

## Identifikasi Sektor Potensial Penggerak Kegiatan Ekonomi Kecamatan Kurang Berkembang di Kab. Tangerang

ASEP HARIYANTO <sup>1</sup>, DADAN MUKHSIN <sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Planologi Unisba, Jl. Tamansari No.1 Bandung. Email: <sup>1</sup> asep\_har@yahoo.co.id, <sup>2</sup> dadan@unisba.ac.id

### Abstract

The success of regional development depend on some factors, especially economic activity. This study tries to illustrate potential economic factors to develop household economy over several sub-districts of Tangerang, particularly in less developed area. Several approach were carried out, i.e. economic, social, and physical, by employing some analysis methods such as Location Quotient, Shift Share, and SWOT Analysis. This study has found promising sectors to be developed in less economy capability subdistricts of Tangerang. Those sectors are food crop, fishery, farming, natural-based tourism, pilgrimage, small and medium scale industries.

Kata kunci: potential sectors, economic catalyst, less developed.

### I. PENDAHULUAN

Sejalan dengan proses desentralisasi pembangunan yang di dalamnya terkandung tujuan dari pelaksanaan otonomi daerah, maka kemampuan daerah (khususnya Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten) dalam melaksanakan pembangunan dengan pendekatan strategi perlu terus ditingkatkan, dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang lebih terarah dan optimal. Hal tersebut dimaksudkan agar pembangunan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif, baik yang berkenaan dengan pemanfaatan sumberdaya, maupun sumber dana, serta dalam rangka mengintegrasikan kegiatan dan berbagai aktivitas pembangunan antar lokasi dan antar sektor.

Dengan adanya perubahan paradigma tersebut membawa konsekuensi logis bagi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Tangerang yang menginginkan per-

kembangan dan kesiapannya mengelola pemerintahannya sendiri dengan mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya yang ada, baik sumber daya alam, manusia, dana maupun teknologi. Pergeseran nilai ini menyebabkan perubahan manajemen dari pola sentralistik menjadi desentralistik yang menitikberatkan pemberdayaan daerah, sehingga orientasi pembangunan mengalami perubahan dari pola sektoral menjadi pola kewilayahan.

Kabupaten Tangerang dalam beberapa tahun terakhir ini telah mengalami perkembangan yang luar biasa. Hal ini disebabkan karena letak geografis Kabupaten Tangerang cukup strategis, kerena berdekatan dengan DKI Jakarta. Keadaan ini memungkinkan untuk menerima imbas perkembangan DKI Jakarta. Namun, dalam proses penjarannya, tidak semua wilayah atau kecamatan di Kabupaten Tangerang menerima imbasan dan perkembangan tersebut, akan tetapi hanya

terjadi di beberapa daerah yang mempunyai potensi dan akses yang tinggi terhadap DKI Jakarta dan daerah lainnya, khususnya daerah-daerah yang dilewati jalur jalan regional.

Untuk mencapai perkembangan yang merata di seluruh kecamatan di Kabupaten Tangerang perlu dilakukan penelitian mengenai sektor-sektor potensial pembangunan di setiap daerah, khususnya pada daerah-daerah yang masih rendah perkembangannya (kurang berkembang), yaitu daerah yang basis ekonominya didominasi oleh kegiatan pertanian. Pembangunan daerah tersebut perlu terus ditingkatkan untuk mengimbangi perkembangan yang terjadi di daerah yang pesat pertumbuhannya. Peningkatan tersebut dilakukan di samping dengan cara mengupayakan keselarasan laju pertumbuhan antardaerah, juga dengan memberikan perhatian khusus kepada daerah yang relatif masih tertinggal, daerah terpencil, daerah perbatasan, dan juga daerah minus dan padat penduduk.

Didasari oleh kondisi bahwa perkembangan perekonomian suatu wilayah tidak terlepas dari unsur penunjang aktivitas perekonomian seperti barang, modal, pasar, dan lain-lain. Sudah selayaknya kalau Pemerintah Kabupaten Tangerang berusaha meningkatkan dan memberikan perhatian yang lebih kepada daerah-daerah yang kurang berkembang tersebut, sehingga secara bertahap dapat meningkatkan perkembangan daerah tersebut yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan daerah. Apalagi kegiatan potensial yang ada di daerah biasanya terbukti mampu bertahan terhadap krisis ekonomi yang melanda Bangsa Indonesia akhir-akhir ini.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka saat ini penulis ingin mencoba mengidentifikasi kegiatan potensial yang menjadi penggerak kegiatan ekonomi di kecamatan yang kurang berkembang. Identifikasi Sektor Potensial ini bertujuan untuk memberikan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang dan pihak-pihak terkait mengenai sektor-sektor potensial yang menjadi penggerak kegiatan ekonomi dan

kendala pengembangannya yang dihadapi sehingga dapat dijadikan masukan untuk pengembangan lebih lanjut yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan perkembangan wilayah secara keseluruhan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka ada beberapa permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini yaitu: (1) Sektor-sektor potensial apa saja yang mampu menjadi penggerak kegiatan ekonomi di kecamatan yang kurang berkembang (Cisoka, Kronjo, Kresek, dan Jambe) Kabupaten Tangerang?; (2) Sejauhmana sektor-sektor potensial tersebut dapat dikembangkan, sehingga mampu menjadi penggerak ekonomi di kecamatan yang kurang berkembang tersebut?

Adapun manfaat tulisan ini di antaranya adalah: (1) Sebagai masukan bagi Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam pengelolaan dan pengembangan sektor-sektor potensial yang menjadi penggerak kegiatan ekonomi pada masa yang akan datang berkaitan dengan upaya peningkatan pendapatan daerah; (2) Pengembangan potensi (iklim usaha) yang kondusif yang mendorong pelaku usaha lebih berperan aktif; (3) Penelitian ini akan menjadi sarana bagi masyarakat untuk memberikan masukan mengenai sektor-sektor potensial yang ada diwilayahnya yang dapat dikembangkan; (4) Sebagai bahan masukan bagi para pelaku investasi (swasta dan masyarakat) yang bergerak di bidang ekonomi di Kabupaten Tangerang; (5) Merangsang dan membangkitkan motivasi kepada masyarakat di Kecamatan Cisoka, Kronjo, Kresek, dan Jambe untuk lebih meningkatkan produktivitas dari kegiatan ekonomi potensial yang ada di wilayahnya.

#### A. Penjelasan Umum

Tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat menuju masyarakat adil dan makmur, sehingga dapat dirasakan dan dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya dinikmati oleh segolongan masyarakat yang dapat disentuh oleh hasil-hasil pembangunan.

Pembangunan harus dinikmati oleh

seluruh lapisan masyarakat dimanapun mereka berada di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian adil dan makmur sebenarnya relatif, sehingga sukar diberi batas kuantitatif. Namun, jelas bahwa yang dikehendaki masyarakat Indonesia adalah pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat dan hasil pertumbuhan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat dan bukan hanya golongan kecil masyarakat saja. Mereka yang belum tersentuh dan menikmati hasil-hasil pembangunan tersebut yaitu masyarakat "terbelakang".

Pada dasarnya, setiap daerah/wilayah mempunyai potensi penunjang kehidupan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan ini tercermin dari perbedaan fungsi dan tingkat perkembangannya. Besar kecilnya tingkat perkembangan suatu daerah sangat tergantung pada faktor-faktor perkembangan, yang meliputi aspek fisik, demografi dan sosial-budaya, ekonomi, dan kelembagaan.

Secara geografis, perkembangan wilayah pasti tidak seimbang, letak sumber daya alam dan sumber daya manusia tersebar tidak merata. Potensi dan nilai lokasi dari masing-masing wilayah juga berbeda-beda (Hirschman, 1970: 25). Pada beberapa tempat terdapat titik-titik pertumbuhan (*Growth Point*) yang merupakan kekuatan besar untuk mendorong pemusatan pertumbuhan ekonomi.

Adanya keuntungan eksternal di titik-titik pertumbuhan menyebabkan semakin besarnya pemusatan pertumbuhan ekonomi tersebut. Pada perkembangan selanjutnya, wilayah yang mempunyai titik pertumbuhan dapat menjadi wilayah maju yang akan terus semakin berkembang. Sementara, wilayah diluar titik-titik pertumbuhan terserap sumber dayanya oleh wilayah maju. Seiring dengan penanaman modal yang tidak seimbang serta perbedaan sumber daya manusia menyebabkan wilayah diluar titik-titik pertumbuhan tersebut menjadi kurang berkembang.

Kurang berkembangnya suatu wilayah

disebabkan pula oleh tidak terdapatnya kemampuan wilayah tersebut untuk tumbuh dan berkembang dengan kekuatan sendiri. Dorongan pertumbuhan di wilayah yang kurang berkembang diperoleh dari pusat-pusat pertumbuhan.

Suatu wilayah yang kurang berkembang umumnya belum memobilisasi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kelembagaannya yang sebenarnya merupakan potensi bagi perkembangan wilayah (Stohr, 1981: 43). Pemanfaatan teknologi belum terlaksana sepenuhnya di wilayah tersebut. Mengalirnya potensi sumber daya alam dari wilayah tersebut ke wilayah maju juga menjadi penyebab kurang berkembangnya wilayah tersebut.

Perekonomian suatu wilayah yang kurang berkembang dicirikan oleh dominasi sektor pertanian. Sektor pertanian ini mempunyai tingkat produktivitas dan laju pertumbuhan yang rendah. Kurang berkembangnya suatu wilayah juga disebabkan terdapatnya budidaya pertanian yang masih bersifat tradisional/sangat sederhana dan subsistem serta terdapatnya kelebihan tenaga kerja yang tidak dapat diserap oleh sektor lain.

Kurang berkembangnya suatu wilayah juga disebabkan adanya kemiskinan struktural yang disebabkan oleh interaksi antara wilayah tersebut dengan wilayah maju. Kinerja suatu wilayah yang kurang berkembang berlawanan dengan kinerja wilayah maju yang memiliki kekuatan dinamis dari dalam yang mendorong untuk selalu memproduksi dan sebagai konsekuensinya juga mendorong produktivitas wilayah yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah yang kurang berkembang (Bendavid-Val, 1983: 17).

Kemiskinan struktural muncul sebagai masalah sosio-ekonomi yang paling sulit diubah secara baik karena melibatkan suatu cara kehidupan yang berdimensi ruang. Masalah ini menjadi lebih kompleks bilamana kemiskinan tersebut disebabkan terdapatnya dominasi kelompok tertentu terhadap kelompok minoritas. Terdapatnya kompleks-

tas masalah di wilayah yang kurang berkembang tersebut tidak berarti bahwa wilayah tersebut tidak dapat dikembangkan, meskipun cara yang tepat untuk mengatasinya tidak dapat dengan mudah dirumuskan.

Tidak terintegrasinya perkembangan di wilayah maju dengan di wilayah yang kurang maju juga dapat menjadi penyebab kurang berkembangnya suatu wilayah. Perkembangan di wilayah maju tidak dapat merangsang komersialisasi kegiatan di wilayah kurang maju. Struktur pasar serta penyebaran sarana dan prasarana yang terjadi antara wilayah maju dan wilayah yang kurang maju menjadikan masyarakat di wilayah tersebut tidak dapat memasarkan surplus produksinya, sulitnya untuk mendapatkan input-input produksi, memodernisasi pola pertanian, menyesuaikan produksinya terhadap kebutuhan konsumen (pasar) dan mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hidup dipedesaan.

#### B. Konsep Downward Transitional Area

Strategi pengembangan wilayah terbelakang, menurut teori ini, ditempuh melalui 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan terhadap wilayah eksternal (*core region*), dan pendekatan terhadap wilayah internal (*downward transitional area*). Pendekatan terhadap wilayah eksternal dapat disimpulkan sebagai berikut:

- (1) Menentukan fungsi, pengaruh, atau tingkat kepentingan kedua daerah (*internal* dan *eksternal*) untuk menentukan program dan kegiatannya;
- (2) Mendorong pengembalian arus modal dari wilayah eksternal ke wilayah *internal*;
- (3) Memerbesar kapasitas daya serap wilayah eksternal;
- (4) Membangun permukiman perdesaan dalam skala besar dengan cara memperluas kegiatan pengolahan sumber daya pertanian.

#### C. Konsep Pembangunan "Bottom-Up"

#### dan "Periphery Inward"

Konsep ini merupakan konsep pengembangan wilayah yang kurang berkembang yang didasarkan pada paradigma pembangunan dari bawah. Pertama kali konsep pembangunan *Bottom-Up* dan *Periphery Inward* ini dikemukakan oleh Stohr (1981). Konsep ini didasarkan pada pendapat bahwa pembangunan harus didasarkan pada mobilisasi maksimum dari sumber daya alam, manusia dan institusional masing-masing wilayah, dengan tujuan utama memenuhi kebutuhan dasar penduduk di wilayah tersebut. Konsep ini langsung berorientasi kepada masalah kemiskinan dan keterbelakangan di suatu wilayah.

Tujuan dasar dalam konsep pembangunan *Bottom-Up* dan *Periphery Inward* adalah pembangunan menyeluruh dari sumber daya manusia dan alam di suatu daerah. Tujuan awal konsep ini adalah untuk memenuhi pemerataan kebutuhan dasar seluruh lapisan masyarakat, dan kemudian untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan lainnya. Pada umumnya, pelayanan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar diatur secara teritorial dan dimanifestasikan pada kelompok-kelompok masyarakat yang berskala kecil pada komunitas lokal atau regional (Bendavid-Val, 1983: 23).

Sasaran yang ingin dicapai melalui konsep pembangunan *Bottom-Up* dan *Periphery Inward* adalah peningkatan efisiensi seluruh faktor produksi di daerah-daerah yang kurang berkembang secara terintegrasi. Intergrasi sumber daya yang dimiliki daerah dan struktur sosial yang terdapat di dalamnya harus menjadi dasar momen pembangunan yang dicetuskan dari daerah itu sendiri. Wilayah-wilayah yang dikembangkan dengan pendekatan ini diarahkan untuk tidak terlalu berkaitan sehingga diharapkan dapat berkembang berdasarkan kekuatan sendiri (*self sufficiency*).

Konsep pengembangan wilayah yang kurang berkembang, melalui konsep pembangunan *Bottom-Up* dan *Periphery Inward* mencakup beberapa komponen

penting, seperti yang dikemukakan oleh Stohr (1981: 21), yaitu:

- (1) Penyediaan kesempatan yang luas untuk menggunakan lahan dan sumber-sumber daya alam yang tersedia di wilayah tersebut, karena hal tersebut merupakan faktor-faktor produksi kunci di wilayah terbelakang;
- (2) Pembentukan atau perbaikan struktur pengambilan keputusan terhadap pengelolaan sumber daya manusia dan sumber daya alam dengan pengorganisasian berdasarkan perwilayah-an;
- (3) Memberikan peningkatan "self determination" kepada daerah yang kurang berkembang dalam penggunaan lembaga yang sudah ada untuk mensejajarkan kedudukannya dalam pembuatan keputusan dari semua tingkat pemerintahan;
- (4) Memilih teknologi yang cocok untuk daerah tersebut dengan orientasi untuk meminimalkan pemborosan sumber-sumber terbatas dan memaksimalkan pemanfaatan sumber-sumber daya yang berlebih;
- (5) Memprioritaskan proyek-proyek yang menyediakan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dengan mempergunakan sumber daya secara maksimum serta menggunakan struktur sosial baik formal maupun informal yang sudah ada;
- (6) Memperkenalkan kebijaksanaan harga nasional yang berkaitan dengan komoditas pertanian yang diperdagangkan dan produk-produk lainnya yang khas daerah yang kurang berkembang;
- (7) Penggunaan sumber daya eksternal bila sumber daya internal tidak mencukupi;
- (8) Peningkatan aktivitas produktif yang melebihi permintaan wilayah haruslah ditujukan kepada peningkatan tingkat kehidupan masyarakat di daerah yang kurang berkembang;
- (9) Menstrukturkan kembali sistem kota dan sistem transportasi untuk meningkatkan aksesibilitas penduduk terhadap semua

bagian wilayah;

- (10) Peningkatan transportasi dan fasilitas komunikasi desa-desa dan desa-kampung;
- (11) Peningkatan struktur sosial dan kesadaran bersama penting dalam strategi pembangunan *Bottom Up* dan *Periphery-Inward*. Hal ini hanya dapat dicapai melalui inisiatif internal dan harus mencakup seluruh lapisan sosial di daerah yang kurang berkembang. Dukungan dari luar seperti LSM, organisasi keagamaan dan organisasi intelektual dapat memudahkan peningkatan ini.

#### D. Konsep Integrasi Spasial

Pendekatan ini mengasumsikan bahwa upaya untuk mengembangkan wilayah yang kurang berkembang di negara-negara sedang berkembang ialah dengan memacu perkembangan sektor pertanian yang diintegrasikan dengan sektor industri pendukungnya di wilayah yang sudah maju. Lebih jauh, seluruh sistem ekonomi diintegrasikan melalui struktur pasar yang saling bergantung dengan penyebaran prasarana dan pelayanan untuk membangkitkan akumulasi tabungan dan investasi (Bendavid-Val, 1983:31).

Dengan perhatian utama pada sektor pertanian, maka pendekatan ini menjelaskan bahwa untuk mengembangkan wilayah perlu ada suatu transformasi pola pertanian sub sistem menjadi pertanian komersial. Peningkatan produktivitas sektor pertanian di wilayah yang kurang berkembang harus diikuti pengembangan sektor industri di perkotaan, sehingga kelebihan tenaga kerja di sektor pertanian dapat tertampung.

Untuk mendukung perkembangan pertanian, sehingga nilai komersial produk pertanian meningkat, maka permukiman-permukiman harus membentuk suatu sistem yang terintegrasi, sehingga pelayanan sarana dan prasarana dapat berlokasi secara efisien dan penduduk pedesaan mempunyai akses yang baik terhadap sarana tersebut.

Syarat dicapainya integrasi pengembangan perkotaan dan pedesaan ini adalah transformasi dari struktur tata ruang, organisasi, pola tata laku, kelembagaan sosial ekonomi dan budaya yang ada pada negara berkembang. Transformasi ini akan dicapai melalui:

- (1) Perluasan jaringan organisasi dan informasi agar tercapai identitas yang sama dari seluruh komunitas;
- (2) Integrasi komunitas subsistem kepada sistem ekonomi nasional, komersialisasi pertanian dan perluasan penyebaran fasilitas dan pelayanan yang dibutuhkan pedesaan.

## II. PEMBAHASAN

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif dan metode analisis kuantitatif. Metode analisis kualitatif memaparkan semua data dan informasi sekunder yang berkaitan dengan objek-objek penelitian secara deskriptif, sedangkan metode analisis kuantitatif memaparkan seluruh data dan informasi olahan taksiran yang berhubungan dengan objek-objek penelitian secara matematik-statistik. Untuk mengetahui sektor-sektor potensial pada masing-masing wilayah digunakan metode LQ (*Location Quotient*), *shift-share*, dan analisis swot. Dari metode tersebut akan terlihat sektor-sektor potensial dan wilayah-wilayah yang potensial sebagai berikut:

### A. Kecamatan Kronjo

Berdasarkan hasil analisis, dapat diketahui bahwa di Kecamatan Kronjo terdapat beberapa sektor potensial yang menjadi penggerak ekonomi masyarakat. Adapun sektor-sektor tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) Sektor pertanian, meliputi tanaman padi sawah, ketela pohon dan jenis kacang-kacangan.
- (2) Sektor peternakan, meliputi: kambing, domba, itik, ayam ras petelur, dan ayam buras. Jika dihubungkan dengan

perkembangan wilayah studi sektor peternakan, ini sangat menunjang terhadap perkembangan wilayah. Hal itu disebabkan karena terjadi hubungan timbal balik antara sektor peternakan dengan sektor lainnya. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu adanya upaya pendukung terhadap perkembangan peternakan ini, antara lain dengan disediakan sarana pengolahan bahan makanan untuk ternak.

- (3) Sektor perikanan cukup berkembang di kecamatan ini, dikarenakan secara geografis bagian utara kecamatan merupakan wilayah pantai. Kegiatan sektor perikanan ini di samping telah mampu memenuhi kebutuhan bagi warga masyarakat, juga mampu memasok bagi masyarakat yang berada di luar kecamatan ini, terutama kecamatan-kecamatan lain yang tidak memiliki potensi perikanan. Pengembangan sektor perikanan ini terdiri dari 2 (dua) yaitu: perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Perikanan budidaya di Kecamatan Kronjo, terutama dilakukan di bagian utara sepanjang garis pantai yang membujur dari Desa Pagedangan Ilir sampai ke Desa Jenggot dan wilayah pesisir Kecamatan Kresek yang memiliki potensi luas lahan dan sumber daya air, yang sebagian merupakan lahan untuk budidaya pertambakan, disamping itu juga terdapat pemanfaatan areal rawa-rawa dan hutan mangrove yang telah dikonversikan menjadi lahan pertambakan.
- (4) Sektor Industri Kecil dan Kerajinan, terutama yang mengolah hasil laut menjadi makanan seperti industri kerupuk, ikan asin, dan lain-lain.
- (5) Sektor Pariwisata, meliputi: *Wisata Alam* (wisata pantai Pulau Cangkir dan wisata hutan /mangrove) dan *Wisata Ziarah* (Makam Pangeran Sebrang Lor atau Pangeran Penjaga Laut di Pulau Cangkir Kecamatan Kronjo).

B. Kecamatan Kresek

Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa di Kecamatan Kresek terdapat beberapa sektor potensial yang menjadi penggerak ekonomi masyarakat. Adapun sektor-sektor tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) Sektor pertanian, meliputi: tanaman padi sawah, palawija dan jenis kacang-kacangan.
- (2) Sektor peternakan, meliputi: ternak kambing, domba, itik, ayam ras petelur dan ayam buras.
- (3) Sektor Industri Kecil dan Kerajinan, terutama yang mengolah limbah industri besar untuk dijadikan produk-produk pakaian seperti kaos kaki, sandal, baju kaos, tas, dan topi.

C. Kecamatan Cisoka

Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa di Kecamatan Cisoka terdapat beberapa sektor potensial yang menjadi penggerak ekonomi masyarakat. Adapun sektor-sektor tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) Sektor pertanian, meliputi: tanaman padi sawah, palawija dan jenis kacang-kacangan.
- (2) Sektor peternakan, meliputi: ayam ras petelur, ayam ras pedaging dan itik.
- (3) Sektor Industri Kecil dan Kerajinan terutama yang mengolah limbah industri besar menjadi bahan kerajinan seperti kaos kaki, sepatu, sandal, pakaian, dan lain-lain.
- (4) Sektor Pariwisata, berupa Wisata Ziarah yang terdapat di Desa Solear berupa makam keramat dengan keadaan alam yang masih asri dan komunitas kera (monyet) yang relatif banyak disekitar objek wisata ini. Objek Wisata ini banyak dikunjungi oleh wisatawan, terutama mereka yang ingin berziarah atau sekedar melihat-lihat kera yang banyak berkeliaran di kawasan ini.

D. Kecamatan Jambe

Berdasarkan hasil analisis dapat

diketahui bahwa di Kecamatan Jambe terdapat beberapa sektor potensial yang menjadi penggerak ekonomi masyarakat. Adapun sektor-sektor tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) Sektor peternakan, meliputi: sapi, kerbau, kambing, domba, ayam rasa pedaging, dan ayam buras.
- (2) Sektor Industri Kecil dan Kerajinan terutama industri anyaman bambu, industri kompor, dan industri hio.

Sesuai dengan tujuan tulisan untuk mengidentifikasi sektor potensial yang menjadi penggerak kegiatan ekonomi, maka pada bagian ini akan diuraikan berdasarkan sektor:

1. Pertanian

Berdasarkan hasil analisis, ternyata sebagian besar wilayah studi sesuai untuk pengembangan pertanian tanaman lahan basah dan lahan kering. Adapun untuk menentukan jenis tanaman yang sesuai untuk dibudidayakan perlu dilakukan studi lanjutan. Berdasarkan hasil analisis LQ, *shift-share* dan swot kecamatan yang memiliki potensi pertanian khususnya padi sawah dan palawija (ketela dan kacang-kacangan), yaitu: Kecamatan Kronjo dan Kresek.

2. Peternakan

Pengembangan kegiatan peternakan diarahkan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing kecamatan. Pengembangan lebih ditekankan kepada upaya peningkatan sarana dan prasarana pendukung serta sistem pengelolaan.

3. Perikanan

Pengembangan kegiatan perikanan diarahkan sesuai dengan potensi yang dimiliki terutama di Kecamatan Kronjo. Pengembangan lebih ditekankan kepada upaya penataan dan perbaikan perkampungan nelayan serta sarana dan prasarana pendukung kegiatan perikanan.

4. Pariwisata

Pengembangan pariwisata di wilayah

studi diarahkan pada wisata alam dan ziarah Pulau Cangkir di Kecamatan Kronjo. Selain itu, juga diarahkan pada wisata ziarah makam kramat di Desa Solear Kecamatan Cisoka. Potensi dasar yang dimiliki Pulau Cangkir adalah pemandangan laut yang cukup menarik dan adanya makam Raja Sebrang Lor. Sedangkan potensi dasar yang dimiliki Desa Solear adalah adanya makam kramat dan komunitas monyet yang cukup banyak dan dapat berinteraksi dengan manusia. Pengembangan obyek-obyek wisata ini harus didukung dengan peningkatan sarana dan prasarana terutama jaringan jalan.

#### 5. Industri Kecil dan Kerajinan

Pengembangan industri di wilayah studi diarahkan pada kegiatan industri kecil. Pengembangan kegiatan ini diarahkan pada semua kecamatan yaitu Cisoka, Jambe, Kronjo, dan Kresek. Industri yang dikembangkan di kecamatan-kecamatan tersebut adalah industri pembuatan genting dan batu bata, industri pengolahan limbah industri besar (Cisoka); industri hio, industri anyaman, industri pembuatan kompor (Jambe); industri pengolahan hasil pertanian, industri kaos kaki, industri tas, industri kaos, industri sepatu, dll (Kresek). Sedangkan untuk Kecamatan Kronjo lebih diprioritaskan untuk kegiatan industri yang mengolah hasil laut. Kegiatan industri tersebut saat ini sudah terkonsentrasi di desa-desa tertentu, sehingga untuk pengembangannya tetap dipertahankan di desa-desa tersebut.

### III. PENUTUP

Jika dilihat dari potensi yang ada, sebetulnya masih banyak potensi dan peluang yang dapat digali dan dipacu peningkatan penerimaannya. Hal ini dapat terwujud apabila dilakukan verifikasi pendataan lapangan secara lebih akurat, dilakukannya penelitian-penelitian yang lebih rinci, disertai dengan peningkatan mutu sumber daya manusia khususnya di bidang manajerial, akuntansi, kedisiplinan, dan kemampuan lainnya yang berkaitan dengan

kemampuan analisis dan penerapan dilapangan. Sumber daya alam berupa sektor pertanian, pariwisata perlu ditelaah lebih lanjut, terutama menyangkut kemampuan dan kesesuaiannya bagi berbagai pengembangan yang memungkinkan, hal ini diperlukan karena beberapa tindakan bagi pengembangan membutuhkan sumber daya alam, dan harus diketahui pula kapasitas dan kesesuaiannya untuk pengembangan.

Sumber daya manusia juga perlu ditelaah lebih lanjut terutama kondisi sosial-ekonomi masyarakat setempat serta kesiapan masyarakat dalam mengantisipasi pengembangan wilayah, khususnya menyangkut kemampuan dan ketrampilan masyarakat.

Faktor lain sebagai strategi bagi pengembangan sektor-sektor potensial sebagai pendukung upaya peningkatan PAD Kabupaten Tangerang yang perlu diperhatikan adalah faktor pemerintah, masyarakat, dan swasta. Pemerintah perlu melakukan tindakan-tindakan yang mendukung, misalnya dengan membuat kebijaksanaan dan menciptakan kondisi yang dapat menggali potensi setempat dan memberi pendanaan yang diperlukan.

Adapun dukungan dari masyarakat sangat diperlukan, terutama dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan masyarakat itu sendiri, misalnya peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai pembangunan dan penyebaran informasi yang berguna bagi pengembangan itu sendiri. Secara kualitatif potensi investasi swasta sangat besar, serta proses pelibatan swasta dalam pengembangan sektor potensial akan selalu menunggu kepastian pasar dan hukum pemerintah. Maka pada saatnya tinggal menggerakkan investasi swasta kepada yang diperlukan dalam pengembangan sektor-sektor potensial tersebut.

#### Daftar Pustaka

Bendavid-Val, A., (1983). *Regional and Local Economics Analysis for Pratitioners*. New York, Preager.



Hirschman, A. O., (1970). *Strategi Pembangunan Ekonomi*. Terjemahan. Paul Sihotang. PT. Dian Rakyat, Jakarta.

Stohr, W. B, (1981). *Development from Below: The Bottom-Up and Periphery-In-*

*ward Development Paradigm'*, dalam Walter B. Stohr, *Development from Above or Below?: The Dialectics of Regional Planning in Developing Countries*, John Wiley and Sons, USA.

